

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik berkepanjangan antara Korea Selatan dan Jepang mengenai isu *comfort women* ini merupakan isu tentang pelanggaran HAM terhadap wanita di tahun 1932-1945. Isu ini menyebabkan adanya sengketa yang menjadi penentu jalannya hubungan antara Jepang dan Korea Selatan di masa mendatang.¹ Pelanggaran ini menyebabkan tercorengnya citra Jepang di mata masyarakat internasional hingga menuntut Jepang untuk melakukan permohonan maaf serta pertanggung jawaban terhadap para korban penyintas *comfort women* yang masih hidup.

Akan tetapi tepat pada hari peringatan Perang Dunia II di Korea Selatan, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tidak mau menindaklanjuti permintaan tersebut. Menurut Abe, tidak ada bukti yang memperlihatkan pemerintahan Jepang ikut terlibat. Abe menuturkan bahwa hal tersebut merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tentara Jepang.² Oleh sebab itu, pemerintah Jepang tidak mau ikut campur. Sikap abai terhadap upaya pertanggungjawaban tersebut menuai kontroversi.³

Merespon sikap Jepang, Korea Selatan mengancam akan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Jepang sebelum adanya pemenuhan

¹ Galuh Kinnari Lalitya, "Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintahan Korea Selatan pada Masa Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort," *Journal of International Relations* 6, no. 4, (2020): 639-648.

² Rizka Fauzia, "Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreement on Comfort Women tahun 2011-2015," *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 4, no.1 (2017): 3.

³ Rizka Fauzia.

pertanggungjawaban dari Jepang.⁴ Setelah lama dibiarkan, pada tanggal 28 Desember 2015 Pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Geun Hye, akhirnya Korea Selatan dan Jepang mau menyelesaikan persoalan ini. Kemudian lahirnya “*Agreement on Comfort Women Japan-ROK 2015*” sebagai bentuk penyelesaian isu *comfort women*.

Isi dari perjanjian tersebut adalah pemerintahan Jepang bertanggung jawab akan isu *comfort women* yang melibatkan tentara Jepang dan PM Abe menyatakan permohonan maaf, lalu pemerintahan Jepang akan memberikan kompensasi dana melalui badan yang akan dibentuk oleh pemerintahan Korea Selatan dan terakhir pemerintahan Jepang mengkonfirmasi bahwa perjanjian ini disepakati dengan klausa *this issue is solved finally and revisibly forever*.⁵ Sebagai tindak lanjut, Jepang mulai memenuhi kewajibannya sesuai dengan *Agreement on Comfort Women 2015*, diantaranya seperti menyerahkan dana reparasi sebesar 1 miliar yen kepada lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintahan Korea Selatan yang dikenal sebagai *The Reconciliation and Healing Foundation*.⁶ Kemudian, Abe juga mengungkapkan permintaan maaf serta penyesalan tepat setelah *agreement* disahkan oleh kedua negara.⁷

Akan tetapi beberapa waktu setelah itu, tepatnya tahun 2017 saat bergantinya kepemimpinan dari Park Geun Hye ke Moon Jae In yang merupakan presiden pertama di Korea Selatan yang beraliran liberal setelah 10 tahun dikuasai

⁴ Rizka Fauzia.

⁵ Dinda Claudia Ayu Eka Putri, “Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan-ROK Agreement On Comfort Women,” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7, no.3 (Desember 2018): 76.

⁶ Dinda Claudia Ayu Eka Putri, 72.

⁷ Stephan Haggard, “The Comfort Women Agreement,” The Peterson Institute for International Economics, Desember 28, 2015, diakses Februari 13, 2021, <https://www.piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/comfort-women-agreement>.

kekuasaan konservatif ini, malah memberikan respon yang sangat kontras.⁸ Latar belakang Moon sebagai ahli hukum dan pengacara pembela HAM membuatnya tidak abai dan bersikap tegas terhadap penyelesaian isu ini. Presiden yang berasal dari partai liberal ini kemudian mendeklarasikan penolakannya secara penuh lewat pidatonya dalam sebuah upacara peringatan hari kebebasan Korea Selatan dari penjajahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 2018.⁹ Sebagai bentuk kepeduliannya, Moon bahkan menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai hari untuk memperingati para korban penyintas *comfort women* untuk pertama kalinya.

Menurut Moon, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara diplomatis melalui perjanjian bilateral. Hal ini sejalan dengan janji kampanye Moon yang saat itu berjanji akan meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat di masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya perjanjian yang dibuat tidak dapat mencerminkan suara para korban penyintas *comfort women*.¹⁰ Namun sayangnya, wacana peninjauan ulang perjanjian yang diajukan oleh Korea Selatan ternyata tidak bisa dipenuhi, karena kedua negara telah setuju untuk tidak membahas isu ini setelah disahkannya agreement pada 2015 silam.¹¹

Karena wacana peninjauan ulang perjanjian tidak dikabulkan Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae In kemudian melakukan tindakan yang

⁸ Glory K. Wadiranto, "Sosok Moon Jae-in, Keturunan Imigan Korut yang Jadi Presiden Korsel," *Internasional Kompas*, Mei 10, 2017, diakses November 17, 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2017/05/10/16230991/sosok.moon.jae-in.keturunan.imigan.korut.yang.jadi.presiden.korsel?page=all>.

⁹ Scoot A. Snyder, "Moon Jae-in's 2018 Liberation Day Speech and South Korea's Foreign Policy," *Council on Foreign Relations*, Agustus 15, 2018, diakses Desember 10, 2020, <https://www.cfr.org/blog/moon-jae-ins-2018-liberation-day-speech-and-south-koreas-foreign-policy>.

¹⁰ Kyodo, "Adherence to 2015 'comfort women' deal with Seoul urged in Japan-U.S. talks," *Japan Times*, Juni 27, 2017, diakses Desember 26, 2020, <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/27/>.

¹¹ Solichin, "Korsel tak Ingin Renegosiasi Soal Jugun Ianfu," *Harian Nasional*, Januari 10, 2018, diakses Desember 23, 2020, <http://www.harnas.co/2018/01/09/korsel-tak-minta-renegosiasi-soal-ianfu>.

didasari atas ketidakpuasan terhadap *Agreement on Comfort women Japan-ROK 2015*. Diantaranya adalah ancaman untuk mendaftarkan dokumen terkait isu perbudakan seksual tersebut ke “*Memory of the World*” UNESCO agar hal ini bisa dijadikan cerita sejarah kelam yang tidak bisa dimaafkan. Melihat apa yang kemudian telah dilakukan oleh Korea Selatan membuat Menteri Luar Negeri Jepang saat ini, Fumio Kishida menyampaikan kekecewaannya. Menurut PM Jepang, dengan melakukan hal ini bukankah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Selatan memiliki tujuan yang sangat bertentangan dengan misi serta tujuan awal mula UNESCO dibentuk, dimana UNESCO dibentuk untuk mendorong persahabatan dan pemahaman antar negara anggota.¹²

Korea Selatan juga terlibat perang dagang dengan Jepang, hal ini diawali dari persoalan tuntutan dari para pekerja paksa dan para korban penyintas *comfort women* yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan kepada tiga perusahaan Jepang yang terjadi di Perang Dunia II, hal ini berkembang kepada penghapusan yang dilakukan Jepang kepada Korea Selatan dari *Whitelist* pada 2 Agustus 2019 yang merupakan daftar negara yang diberikan pembebasan terhadap prosedur ekspor tambahan untuk produk yang berasal dari Jepang. Hal ini kemudian dibalas oleh Korea Selatan yang turut menghapus Jepang sebagai mitra dagangnya.¹³

Selanjutnya hal ini juga merujuk kepada pengunduran diri Korea Selatan dari *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yang

¹² Wikanto Arungbudoyo, “Jepang Protes Upaya Pendaftaran Dokumen Budak Seks ke PBB,” Oke News, Juli 12, 2017, diakses Oktober 20, 2020, <https://news.okezone.com/read/2017/07/12/18/1734148/jepang-protes-upaya-pendaftaran-dokumen-budak-seks-ke-pbb>.

¹³ Jeniffer Gracellia, “Implikasi Penanganan Masalah *Comfort Women* Terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pada Tahun 2015-2019,” *UPH Journal of International Relations* 11, no. 21 (2019): 7.

dinyatakan oleh Moon Jae In pada 24 Agustus 2019.¹⁴ Terdapat pula pemboikotan produk Jepang juga dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan, pemboikotan ini dikenal dengan slogan “*I Will Not Buy, I Will Not Go, and I Will Not Wear*”.¹⁵

Terakhir ada dua kebijakan tegas yang dilakukan oleh Moon terhadap Jepang yaitu pembubaran *The Reconciliation and Healing Foundation* yang merupakan suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintahan Korea Selatan sebagai bagian dari kesepakatan *agreement* bersama Jepang dan adanya diplomasi asertif yang dilakukan oleh Moon dengan dua jalur, yaitu memilih untuk memisahkan isu ekonomi dan isu politik dengan isu historis terhadap Jepang. Keputusan terkait pembubaran ini berdasarkan kepada tidak adanya niat tulus yang ditunjukkan oleh Jepang yang dirasa tidak menghormati para korban penyintas *comfort women* sehingga apa yang diinginkan oleh korban asal Korea Selatan tidak tercapai.

Pengunduran diri yang dilakukan oleh Korea Selatan dari GSOMIA dan perang dagang yang terjadi dengan Jepang merupakan suatu persoalan yang memiliki hubungan kuat dengan hasil yang diperoleh dari isu *comfort women*. Keputusan Korea Selatan dalam menyikapi isu tersebut memberikan tanda tanya besar oleh Jepang, karena ketika di masa kepemimpinan Park Geun Hye, kedua negara telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini agar bisa menjalin hubungan yang baik buat keberlangsungan dua negara.¹⁶

¹⁴ Gracellia, “Implikasi Penanganan Masalah *Comfort Women* Terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pada Tahun 2015-2019,” *Verity UPH Journal of International Relations* 11, no. 21 (2019):7.

¹⁵ Kelly Kasulis, “South Korea’s ‘No Japan’ Boycott is new. But the Wounds Are Old,” *The World Global Post*, Agustus 12, 2019, diakses Februari 7, 2021, <https://www.pri.org/stories/2019-08-12/south-korea-s-no-japan-boycott-new-wounds-are-old>.

¹⁶ Galuh Kinnari Lalitya, “Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintahan Korea Selatan pada Masa Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort,” *Journal of International Relations* 6, no.4 (2020): 640.

Gaya kepemimpinan Moon Jae In sebagai pemimpin Korea Selatan yang fenomenal ini membuat dia masuk kedalam 50 orang pemikir di dunia pada tahun 2018 dan 100 orang pemikir dunia tahun 2019 yang diterbitkan oleh media khusus diplomasi dan keamanan 'Foreign Policy'.¹⁷ Selanjutnya pada tahun sebelumnya yaitu 2018 Moon masuk kedalam kategori 50 pemimpin yang terbaik versi majalah Fortune dan 100 orang yang paling berpengaruh pada majalah Forbes dan Times.¹⁸ Hal ini mengindikasikan besarnya pengaruh sosok Moon Jae In dalam pemerintahan Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae In dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu *comfort women*.

1.2 Rumusan Masalah

Gaya kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Park maupun Moon sangat terlihat bertolak belakang, jika Park lebih menggunakan cara yang lembut maka Moon lebih memperlihatkan ketegasannya dalam membuat kebijakannya. Hal ini tidak lepas dari persoalan isu *comfort women*. Setelah dibentuknya *Agreement On Comfort Women* di tahun 2015 oleh Park, di bawah kepemimpinannya Moon malah melakukan hal yang sangat kontras, Moon mengungkapkan dengan tegas ketidakpuasannya terhadap *agreement* dengan cara menghapus *The Reconciliation and Healing Foundation* sebagai salah satu bentuk penolakannya. Perbedaan sikap yang di tunjukan oleh Moon memberikan suatu perubahan yang kontras terhadap kebijakan Korea Selatan terhadap Jepang dan menjadikan daya tarik

¹⁷"Presiden Moon Jae In Termasuk Dalam 100 Orang Pemikir Dunia," KBS World Radio, Januari 23, 2019, diakses Maret 2, 2021, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=53189.

¹⁸ Kim Young Shin, "Presiden Moon Jae In Honored By Fortune, Time," Korea Net, April 20, 2018, diakses Februari 3, 2021, <https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=157458>.

untuk diteliti, mengingat Moon adalah presiden pertama di Korea Selatan setelah 10 tahun dikuasai kekuasaan konservatif dan presiden terpilih yang berasal dari partai politik beraliran liberal setelah Presiden Roh Moo Hyun yang juga merupakan sahabat dan *role model* baginya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan pada rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae In dalam kebijakan luar negeri terhadap Jepang terkait isu *comfort women* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan Moon Jae In dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait kasus *comfort women* di bawah kepemimpinan Moon Jae In yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari presiden sebelumnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membantu para penstudi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian-penelitian lainnya dalam kasus *comfort women*, khususnya tentang gaya kepemimpinan seorang kepala negara dalam mengambil kebijakan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis topik penelitian, penulis menggunakan setidaknya 6 kajian pustaka yang dirasa relevan serta bisa dijadikan bahan untuk penelitian ini. Sebelum memulai penelitian, penulis mencoba untuk menggunakan tulisan-tulisan penelitian terdahulu guna menjadikannya tolak ukur dan landasan bagi penulis

dalam mengembangkan ruang lingkup dari penelitian yang ditulis oleh peneliti selanjutnya.

Pertama, penulis menggunakan tulisan dari Fiandara Dwi Adityani yang berjudul “Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu “*Comfort Women*” terhadap Kerja sama Keamanan Jepang dan Korea Selatan”. Trauma akan perlakuan Jepang kepada korban penyintas *comfort women* dari Korea Selatan membuat para korban *comfort women* ini merasa rendah, hal ini lah yang kemudian menimbulkan adanya anti Jepang pada masyarakat Korea Selatan yang bisa dilihat dari opini Korea Selatan.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana Korea Selatan dan Jepang pada akhirnya bisa melakukan kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan setelah menyelesaikan konflik “*comfort women*” yang menjadi salah satu alasan mengapa Jepang dan Korea Selatan sangat sulit melakukan kerjasama.

Metode yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah konsep *memory, war, and world politics* menurut pemikiran Duncan Bell (2006) di mana Duncan menjelaskan bagaimana pentingnya pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan keadaan di masa sekarang. Menurut konsep ini, memori merupakan proses dimana ingatan mengenai kejadian atau impresi yang berasal dari masa lalu dihimpun. Dalam penulisan ini, tulisan yang dibuat oleh Fiandara memiliki dua aspek penting yaitu memori dan trauma yang kemudian mengubah pandangan Korea Selatan terhadap Jepang.

Selain konsep yang telah dipaparkan di atas, penulis juga menggunakan konsep *public opinion, domestic structure, and foreign policy in liberal*

¹⁹ Fiandara Dwi Adityani, “Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu “*Comfort Women*” Terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan,” *Journal of International Relations* 4, no.1 (2018): 28.

democracies. Konsep yang dibuat oleh Thomas Risse Kappen ini memaparkan bagaimana aspek domestik dalam hal opini publik mampu mengubah atau bahkan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Kesimpulan yang diberikan oleh penelitian ini merupakan trauma akan perlakuan Jepang terhadap korban “*comfort women*” yang mempermalukan serta merendahkan martabat bangsa Korea, yang mengakibatkan sentimen anti Jepang oleh masyarakat Korea Selatan yang tercermin pada opini Publik Korea Selatan. Opini publik yang timbul menciptakan persepsi negatif yang menyebabkan susahnyanya terbentuk kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan.

Kajian pustaka kedua, penulis menggunakan jurnal dari Fauziatunnisa dan Swita Amallia Hapsari yang berjudul “Representasi Identitas “*Comfort Women*” dalam Film *I Can Speak*”. Film *I Can Speak* merupakan film yang mengangkat kasus *comfort women* sebagai pusat pembahasannya, kasus ini merupakan isu serius yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Film ini memiliki genre komedi dan drama karena dirasa lebih ringan dalam menyampaikan fakta sejarah ke hadapan publik. Walaupun kasus *comfort women* tidak hanya terjadi di Korea Selatan, tapi sepertinya masyarakat Korea Selatan menganggap serius isu ini, terlebih memang sebagian besar korban penyintas *comfort women* berasal dari Korea Selatan, dengan sejarah buruk akibat penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan. Menurut penulis, perempuan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai pelengkap untuk para laki-laki karena struktur fungsionalnya

yang terletak pada gender menyebabkan *comfort women* tidak mempunyai struktur sosial lebih tinggi dari laki-laki.²⁰

Pada artikel jurnal ini, kedua penulis menggunakan metode penelitian berupa pengumpulan data observasi atau pengamatan terhadap film *I Can Speak* dengan menekankan pada isu *comfort women*. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripsi dimana objek yang digunakan adalah film *I Can Speak* itu sendiri dan mencari dari segi unsur-unsur identitas *comfort women* pada film *I Can Speak* lalu dianalisis menggunakan teori *gender* struktural fungsional dan teori pendukung dari Beauvoir: *The Second Sex*.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis mendapatkan adanya beberapa adegan pada film *I Can Speak* yang membuktikan bahwa perempuan Korea Selatan dijadikan objek seks oleh tentara Jepang. Pada masa penjajahan Jepang perempuan dianggap sebagai pelengkap semata karena struktur fungsional terletak pada gender yang membuat *comfort women* tidak memiliki struktur yang lebih tinggi ketimbang laki-laki.

Kajian pustaka ketiga, penulis menggunakan jurnal dari Dinda Clauda Ayu Eka Putri yang berjudul “Penolakan Korban *Comfort Women System* dari Korea Selatan terhadap 2015-Japan-ROK *Agreement on Comfort Women*.” Pada jurnal ini penulis disini mencoba mengarahkan kepada bahwasanya isu *comfort women* tak hanya menyangkut imperialisme, kolonialisme, nasionalisme, militerisme, dan patriarki tetapi juga menjadi permasalahan kejahatan perang, kejahatan dan perbudakan seksual, sejarah kolonial dan sebagainya. Dalam prosesnya terbukti terdapat keabadian pemerintah Jepang atas kepentingan serta hak-hak reparasi

²⁰ Fauziatunnisa dan Swita Amallia Hapsari, “Representasi Identitas ‘Comfort Women’ dalam Film *I Can Speak*,” *Jurnal Audience* 2, no. 2 (2019): 173.

dimana kondisi pasca perang para korban penyintas *comfort women*, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tidak secara keseluruhan menyelesaikan isu ini dari kacamata korban penyintas *comfort women*.²¹

Sistem ini menjadikan wanita sebagai korbannya yang kemudian didegradasi menjadi sebatas pemenuh nafsu serta kebutuhan seksual dan menjadikannya komoditas. Pada kasus ini, metode yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif dimana kebanyakan data yang digunakan berasal dari beberapa sumber bacaan seperti jurnal, koran dan media massa lainnya. Dalam penulisan jurnal ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana penulis mencoba memaparkan beberapa pernyataan yang sebelumnya telah diambil oleh penulis dari beberapa data yang ada. Kesimpulan dari penulisan ini adalah walaupun pemerintah Jepang telah sepakat dengan pemerintahan Korea Selatan untuk mengakhiri isu *comfort women* melalui 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dari sudut pandang para korban penyintas Korea Selatan merasakan bahwa masalah ini masih belum diselesaikan dengan jelas.

Pada kajian pustaka keempat, penulis memakai artikel jurnal yang ditulis oleh Victor D. Cha pada tahun 2000 yang diberi judul “*Japan’s Grand Strategy on the Korean Peninsula: Optimistic Realism*”, dimana tulisan ini menggunakan konsep *Grand Strategy* dalam perspektif realisme optimis yang lebih mengarah kepada bagaimana *grand strategy* Jepang dalam menghadapi serta memahami konflik di Semenanjung Korea yang telah terbagi dua yaitu Korea Selatan dan Korea Utara di abad ke-21 pada saat Perang Dingin berakhir. Jepang mencoba melakukan banyak kerja sama politik dan militer dengan Korea Selatan dengan

²¹ Dinda Claudia Ayu Eka Putri, 76.

perhitungan yang cukup hati-hati, hal ini dikarenakan melihat bagaimana kejadian di masa lalu yang diharapkan tidak akan terulang lagi.²² Pada tulisan yang dibuat oleh Cha bisa di simpulkan bahwa tulisan yang dibuat oleh Cha ingin memperlihatkan bagaimana sikap Jepang terhadap Korea Selatan maupun Korea Utara, serta apa saja tindakan yang harus diambil oleh Jepang dalam mengatasi permasalahan isu historis dengan Korea Selatan dengan cara menggunakan jalur diplomasi yang baik dan memuaskan semua pihak.

Kajian kelima penulis menggunakan tulisan yang dikeluarkan oleh Riska Fausia yang berjudul “Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani *Agreement On Comfort Women Tahun 2011-2015*” yang diterbitkan pada tahun 2017. Penulis menggunakan perspektif realis untuk memberikan fokusnya terhadap hubungan internasional yang di mana suatu sistem internasional itu bersifat anarki yang menyebabkan suatu negara harus mengerahkan semua kekuasaannya untuk mencapai kepentingan dan eksistensi dari negara dihadapan dunia.

Pada kajian ini, penulis ingin memperlihatkan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Korea Selatan dalam mencapai kepentingannya, kepentingan yang dimaksud tidak lain adalah pengesahan *agreement on comfort women* yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara kemudian sampai kepada kesepakatan akhir yang membuat Jepang mau tidak mau melakukan kesepakatan yang telah diminta oleh Korea Selatan sebagai tanda penyelesaian permasalahan yang terjadi di masa lalu. Tuntutan ini kemudian mendapatkan sambutan baik oleh Korea Selatan yang kemudian menyuarakan kepada dunia internasional bahwa

²² Victoria D. Cha, “Japan’s Grand Strategy on the Korean Peninsula: Optimistic Realism,” *Japanese Journal of Political Science* 1, no.2 (2000): 249-274.

Jepang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya yang terjadi di masa lalu atas tindakan yang telah mereka lakukan kepada 200 ribu lebih wanita korban kejahatan perang Jepang sebagai budak seks 13amper13 Jepang.²³ Kesimpulannya dalam kepenulisan ini, penulis menggunakan perspektif realisme maka bisa dipastikan bahwa suatu negara yang memiliki kekuasaan yang besar bisa membuat negara yang ditujukan untuk ikut patuh terhadap keinginan suatu negara, begitu pula dalam situasi Jepang dan Korea Selatan pada pengesahan *agreement* untuk korban penyintas *comfort women*.

Keenam terdapat artikel jurnal dengan judul “Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Asimetrik Abad 21” yang ditulis oleh Sekar Hapsari, pada jurnal ini penulis menggunakan teori kepemimpinan yang diambil dari tulisan Susilo Maryoto pada tahun 1996. Pada teori gaya kepemimpinan yang digunakan oleh penulis setidaknya ada lima macam gaya kepemimpinan. Pertama, direktur otoritatif yang diartikan sebagai pemimpin yang menjadi pusat komando terhadap bawahan, kedua persuasif, dimana otoritas dan kontrol utama ada pada pimpinan, ketiga, konsultatif dimana pemimpin memberikan peluang terhadap bawahan untuk merencanakan sesuatu di bawah arahan pemimpin, keempat ada partisipatif dengan gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan yang tidak terhingga kepada anggotanya untuk berpendapat. Terakhir, musyawarah, pemimpin dengan gaya seperti ini cenderung melakukan sesuatu dengan cara kekeluargaan.²⁴

²³ Rizka Fauzia, 8.

²⁴ Sekar Hapsari, “Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Asimetrik Abad 21”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, vol. 5, no. 2, (2018): 142-143.

Dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana gaya kepemimpinan yang diambil oleh Jokowi dengan gaya *low profil* beliau yang dijual sebagai daya tariknya, melalui pertanyaan apakah Jokowi mampu meminimalisir ancaman asimetrik yang akan datang pada generasi saat ini. Menurut penulis pada abad ke 21 ada banyak kompleksitas yang timbul akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Akibat yang di timbulkan juga berupa ancaman yang bisa diterima oleh suatu negara. Pada era seperti ini kepemimpinan sebaiknya mengutamakan kearifan lokal penduduk Indonesia demi mencegahnya ancaman yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Dengan kebijakan pertahanan yang dipilih Presiden Jokowi pada saat ini yang serta gaya kepemimpinan yang lebih memfokuskan kepada musyawarah dirasa memiliki peluang lebih besar untuk mengamalkan negara dari ancaman-ancaman yang akan datang.

Terakhir penulis akan menggunakan tulisan yang diterbitkan oleh Insan Harapan Harahap dengan judul “Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju” pada artikel jurnal ini penulis menggunakan konsep gaya kepemimpinan dalam melakukan risetnya. Menurut penulis tantangan besar yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin adalah bagaimana kemudian seorang pemimpin negara mampu menjadi wajah utama untuk negaranya.²⁵ Metode penelitian yang digunakan oleh Insan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Pada kajian ini penulis ingin menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan hasil kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Lee Kuan Yew di masa pemerintahannya pada tahun 1959-1990. Walaupun pada masa

²⁵ Insan Harapan Harahap, “Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju”, *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* Vol.2 No.1 (Maret 2019): 2.

kepemimpinannya mengalami pro dan kontra tetapi di masa beliau menjabat Lee memiliki legitimasi untuk memimpin serta mengimplemntasikan setiap kebijakan agar bisa memberikan wajah baru untuk negaranya. Kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan ini adalah seseorang pemimpin tidak serta merta dipahami menjadi sosok yang otoriter dalam kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinan Lee Perdana Menteri Singapura ini melakukan penggabungan gaya kepemimpinan yang otoritarian dengan demokratis atau yang disebut dengan mobokrasi atau *hybrid regime*, atau yang banyak dikenal sebagai ‘demokrasi ala Asia.’ Gaya kepemimpinan Lee menjadi alat dalam memelihara jalannya perekonomian dan politik Singapura yang berkinerja tinggi dan stabil pada waktu bersamaan. Gaya Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Lee ini ternyata bisa menghasilkan Singapura menuju negara yang maju dalam waktu tiga dekade yang dirasa singkat.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Menurut Tayfur, politik luar negeri merupakan suatu bentuk kegiatan resmi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh badan-badan resmi negara berdaulat sebagai orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan terhadap lingkungan eksternal negara.²⁶ Menurut K.J Holsti, politik luar negeri merupakan suatu gagasan yang dibuat oleh para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah atau mendorong perubahan lingkungannya, yaitu dalam politik, sikap atau tindakan negara lain.²⁷ Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri adalah strategi yang dilaksanakan oleh negara

²⁶ Fatih Tayfur, “Main Approaches to the Study of Foreign Policy : A Review, Department of International Relations,” *METU Studies in Development* 21, no.1 (1994): 138.

²⁷ K.J Holsti, M. Tahir Azhari dan Herman Sinaga, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988), 260-261.

melalui pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan nasional negaranya, yang beroperasi dalam dinamika kebijakan internasional dalam hubungannya dengan entitas politik lainnya.²⁸ Kepentingan nasional di sini berarti segala sesuatu yang menjadi masalah atau dianggap penting oleh masyarakat dan tokoh negara.²⁹

Hermann juga membantu mendefinisikan politik luar negeri sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar oleh negara, baik yang diputuskan oleh individu maupun kelompok.³⁰ Apalagi pemimpin akan secara langsung mempengaruhi keputusan yang menyangkut pembentukan kebijakan luar negeri negara, sehingga analisis keputusan kebijakan luar negeri harus fokus pada perilaku individu pemimpin keputusan tersebut.³¹ Menurut John P. Lovel, ada beberapa aktor utama yang keberadaannya mempengaruhi proses perumusan politik luar negeri suatu negara, antara lain struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara bangsa lain dan kemampuan negara.³²

Menurut Yayan M Yani dan A.A Banyu Perwita di dalam proses perumusan kebijakan luar negeri terdapat beberapa sumber utama yang memiliki pengaruh di dalamnya.³³ Pertama, sumber sistematis (*systematic source*) yang berasal dari luar wilayah suatu negara. Kedua, sumber masyarakat (*social source*) yang didapatkan dari adanya pembuatan kebijakan luar negeri yang berasal dari

²⁸ Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary 3rd Edition* (England: Clio Press Ltd, 1979), 5.

²⁹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), 184.

³⁰ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences and Public Affairs* 66, no. 4 (Oktober 8, 2018): 2-9.

³¹ Nitai Chakrabarti, "Beliefs, Perception, And Foreign Policy: The Need Of Perspective," *The Indian Journal of Political Science* 49, no. 3 (Juli 28, 1988): 328-342.

³² Nitai Chakrabarti, "Beliefs, Perception, And Foreign Policy: The Need Of Perspective," 328-342.

³³ Yayan Mochmad Yani dan Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2005), 161-170.

masyarakat. Ketiga, sumber pemerintah (*governmental source*) yang berasal dari pemerintahan suatu negara yang terdiri dari para elit politik dan pemerintah di suatu negara. Keempat, sumber idiosinkratik (*idiosyncratic source*) yang berasal dari kepercayaan, kepribadian, nilai dan pengalaman yang dimiliki oleh individu.

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan serta menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae In sebagai pemimpin yang tentu saja memiliki andil besar dalam memutuskan kebijakan seperti apa yang tepat untuk warga negaranya. Gaya yang dimiliki oleh seorang pemimpin tentu saja memiliki pengaruh terbesar dalam membuat keputusannya, diawali dari proses pengambilan hingga pada bagian yang kompleks tentu saja akan dipengaruhi dengan faktor-faktor yang ada di lingkungannya. Melihat latar belakang Moon Jae In yang dahulu merupakan lulusan sarjana hukum dan HAM tentu saja hal ini menjadi pengaruh besar dalam kebijakan yang akan dibuat oleh Moon Jae In sebagai pemimpin dan tentu saja hal ini dirasa sangat berhubungan dengan sosok Moon Jae In sebagai individu.

Melihat bagaimana Yayan M Yani dan A.A Banyu Perwita memberikan apa-apa saja sumber utama dalam membentuk kebijakan maka bisa dipahami bahwa sumber idiosinkratik pada tingkat individu yaitu Moon Jae In merupakan sumber yang paling tepat dalam memahami bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan didorong oleh cara pandang maupun latar belakang serta pengalaman Moon Jae In dalam mengeluarkan kebijakan negaranya dan hal ini sangat berpengaruh satu dan yang lain.

1.7.2 *Predominant Leader*

Predominant leader adalah pemimpin yang memiliki dominasi lebih pada

suatu pemerintahannya yang biasanya merujuk kepada pembentukan suatu kebijakan.³⁴ Secara menyeluruh ada dua tipe gaya kepemimpinan yaitu *goal-driven* dan *situationally/contextually responsive*. Pemimpin dengan gaya *goal-driven* yang memiliki dorongan atas tujuannya biasa dikenal sebagai *the crusaders, the ideologues* dan mereka yang teratur, *task-oriented* atau *transformational in focus* menafsirkan lingkungannya dengan menggunakan lensa yang telah dibentuk oleh kepercayaan, motivasi, perilaku dan semangat (*passion*). Pemimpin yang memiliki sifat ini biasanya hidup dalam kebenaran diri sendiri yang ditentukan oleh analogi mereka tergantung dengan siapa mereka dan apa yang akan mereka kerjakan.³⁵

Kemudian pemimpin yang *situationality*, pemimpin yang memiliki respon yang cepat dalam kondisi-kondisi tertentu atau mereka yang lebih peka terhadap situasi yang ada, yaitu pragmatis, oportunis dan mereka yang *relations-oriented* atau *transactional* dalam bernegosiasi, yang berorientasi pada hubungan atau interaksi, seperti penyair yang melihat hidup sebagai panggung yang bisa diperankan oleh bagi banyak orang. Peran pemimpin seperti itu menggambarkan dirinya sebagai orang yang fleksibel dan berpikiran terbuka. Mereka biasanya akan menempatkan perilaku mereka di situasi-situasi tertentu, memastikan posisi orang lain dalam suatu masalah dan memprediksi bagaimana kelompok dan lembaga akan bertindak. Kesimpulannya, citra diri yang dimiliki seorang pemimpin bergantung pada keinginan dan kepentingan untuk orang lain.

³⁴ Margaret G. Hermann, Thomas Preston, Baghat Korany dan Timothy M. Shaw, "Who Leads Matters: The Effects of Powerful Individuals," *International Studies Review* 3, no. 2 (Mai 2003): 83-84 diakses pada 14 Februari 2021, https://www.deepdyve.com/lp/ou_press/who-leads-matters-the-effects-of-powerful-individuals-yK0DJS0UU3

³⁵ Margaret G. Hermann, dkk, 86-87.

Agar dapat diterima entah itu pendapat, sikap, keyakinan, motivasi ataupun *passion* harus diakui oleh pihak luar dan anggota terkait lainnya.³⁶

Selain itu, Hermann dkk menjelaskan kedua gaya kepemimpinan tersebut memiliki dominasi yang berbeda dalam setiap tindakannya. Pemimpin dominan yang lebih *contextually responsive* akan lebih sulit menanggapi situasi-situasi tertentu yang akan dibatasi oleh keadaan dimana mereka lebih cenderung pada tujuan. Mereka tidak mungkin terlibat dalam konflik dan tidak mau menggunakan sumber daya untuk perang kecuali pilihan tersebut didukung oleh faktor-faktor lainnya. Para pemimpin yang dapat menanggapi sesuai dengan situasi dapat mencari dukungan untuk pengambilan kebijakan luar negerinya, akan tertarik dengan pembangunan dan pendekatan multilateral terhadap kebijakan luar negeri, dan akan puas dengan pilihan yang dipilih. Pemimpin *contextually responsive* biasanya ditemukan dalam keadaan konflik guna melobi kepentingan tertentu.³⁷

Kemudian, pemimpin dominan yang digerakkan oleh *goal-driven* datang ke masalah kebijakan luar negeri dengan pemikiran tertentu atau serangkaian prioritas kebijakan. Para pemimpin seperti itu akan menafsirkan dan mendesain ulang situasi di mana tujuan dan prinsip mereka menentukan apa yang penting dalam kebijakan luar negeri. Isu-isu tertentu apakah kemerosotan ekonomi, keamanan militer, imigrasi, dll. Membentuk pandangan para pemimpin ini mengenai prioritas eksternal mereka dan sikap mereka terhadap aktor lain. Tantangan adalah sesuatu yang harus diatasi dan ditangani dan bukan sesuatu

³⁶ Margaret G. Hermann, dkk, 87.

³⁷ Margaret G. Hermann, dkk, 87-88.

yang harus diterima.³⁸ Pemimpin yang dominan dan didorong oleh tujuan dengan giat mencoba berbagai *manuver* untuk membawa pembuatan kebijakan sepenuhnya ke bawah arahan mereka. Margaret G. Herman dkk juga memberikan 3 variabel utama dalam menilai kepekaan seorang pemimpin terhadap konteks politik dalam menentukan apakah ia akan merespon secara kontekstual berdasarkan pada tujuan dan bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan.³⁹

Pertama, *Reaction to Political Constraints* (reaksi terhadap kendala politik). Pemimpin adalah negosiator yang dapat menggerakkan pemerintah dan negara menuju beberapa tindakan asing yang dapat dipengaruhi oleh kendala domestik dan internasional. Para pemimpin dipandang memainkan peran penting dalam perundingan untuk membentuk konsensus antara konstituen domestik dan mitra internasional tentang opsi-opsi tertentu. Pemimpin dapat menggunakan kebijakan luar negeri untuk mengalihkan perhatian dari oposisi, untuk mengakomodasi oposisi atau untuk mengkooptasi posisi oposisi; di mana setiap strategi mempengaruhi karakter keputusan. Seorang pemimpin bisa sangat aktif dalam menghadapi rintangan politik di lingkungannya. Pemimpin yang berorientasi pada tujuan akan lebih nyaman dalam pengaturan di mana mereka berada dalam kendali dan dapat menetapkan kriteria tindakan, sedangkan pemimpin yang secara kontekstual meningkatkan toleransi untuk pembagian kekuasaan dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari itu.

Kedua, *Openness to Information* (keterbukaan terhadap informasi). Pemimpin yang peka terhadap lingkungan sering menjadi penguji hipotesis atau

³⁸ Margaret G. Hermann, dkk, 88.

³⁹ Margaret G. Hermann, dkk, 89-90.

penerima sinyal yang menanggapi masalah kebijakan luar negeri. Mereka mencari informasi dari konteks politik sebelum mendesak tindakan, mereka akan menerima informasi yang masuk secara terbuka. Pada saat yang sama, pemimpin yang didorong oleh tujuan akan mempresentasikan agenda mereka sendiri dan menggunakan pandangan mereka untuk menyesuaikan informasi. Mereka melihat apa yang mereka inginkan dan akan dekat dengan kisaran informasi yang tersedia.

Ketiga, *Motivation for Action* (motivasi untuk bertindak). Motivasi membentuk karakter pemimpin yang penting dalam hidup mereka dan mewujudkannya. Motivasi terdiri dari dua hal, yaitu fokus internal/fokus pada masalah (masalah atau penyebab spesifik, ideologi, kumpulan kepentingan tertentu) dan kemauan untuk mendapatkan umpan balik dari lingkungan/fokus pada hubungan (mencari penerimaan, persetujuan, kekuasaan, dukungan, status atau tepuk tangan). Pemimpin yang fokus pada masalah dan penyebab kurang peka terhadap konteks politik; mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan kemudian mereka melakukannya. Sedangkan, pemimpin yang berminat membangun relasi (*relationship mindsets*) lebih peka terhadap konteks politik karena merasa puas dengan berinteraksi dengan orang lain.

Hermann, dkk juga menjelaskan delapan bentuk gaya kepemimpinan dari analisis tiga variabel di atas⁴⁰, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Gaya Kepemimpinan Sebagai Sebuah Fungsi Terhadap *Responsiveness to Constraints, Openness to Information dan Motivation*

⁴⁰ Margaret G. Hermann, dk, 95.

<i>Responsiveness to Constraints</i>	<i>Openness to Information</i>	<i>Motivation</i>	
		<i>Problem Focus</i>	<i>Relationship Focus</i>
Menantang hambatan (seorang <i>crusader</i>)	Tertutup terhadap informasi	<i>Expansionistic</i>	<i>Evangelistic</i>
Menantang hambatan (secara umum seorang <i>strategic</i>)	Terbuka terhadap informasi	<i>incremental</i>	<i>charismatic</i>
Menghargai hambatan (cenderung ke arah <i>22amper22ria</i>)	Tertutup terhadap informasi	<i>Directive</i>	<i>Consultative</i>
Menghargai hambatan (seorang <i>opportunistic</i>)	Terbuka terhadap informasi	<i>Reactive</i>	<i>Accommodative</i>

Sumber: Margaret G. Hermann, dkk. (2001)⁴¹

Cara pemimpin menghadapi hambatan politik dan informasi digambarkan dalam empat bentuk kepemimpinan, yaitu perang salib, strategi, tindakan pragmatis, dan oportunisme. Tentara Salib adalah tipe pemimpin yang tidak menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Ketika informasi mendukung posisi mereka, mereka akan memberikan alasan yang meyakinkan atas apa yang telah mereka lakukan, yang akan memberi mereka kredibilitas dan legitimasi. Di sisi lain, pemimpin oportunistik paling peka terhadap lingkungan politik, yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mungkin sedang terjadi dalam lingkungan dan waktu saat ini.”

Kemudian, pemimpin strategis adalah mereka yang tahu apa yang mereka lakukan dan mereka mencari informasi berdasarkan tujuan yang paling mungkin untuk saat itu. Pemimpin strategis akan meminimalkan kerugian/risiko dengan mencapai tujuan. Selain itu, pemimpin pragmatis (pragmatis) adalah pemimpin yang bermasalah karena hambatan politik dan lingkungan, sebaliknya

⁴¹ Margaret G. Hermann, dkk, 95.

harus beradaptasi dan bekerja, memiliki pemikiran sendiri dalam mengelola pemerintahan.

Seorang pemimpin *crusader* akan fokus pada perluasan kekuatan dan pengaruh, sementara seorang pemimpin *evangelistic* akan bekerja untuk membujuk orang lain untuk menerima informasi dan karir. Pemimpin *crusader* dan *evangelistic* jarang peduli dengan lingkungan politik di sekitar mereka kecuali hal itu menghalangi mereka untuk bergerak menuju tujuan mereka. Pemimpin *incremental* fokus pada menjaga fleksibilitas dan fleksibilitas 23 amper menghindari rintangan, sementara pemimpin *charismatic* mencapai agenda dengan melibatkan orang lain dan membujuk mereka untuk mengambil tindakan. Pemimpin *incremental* dan *charismatic* mempromosikan perilaku dan pertimbangan strategis; dalam situasi dan keadaan tertentu, bagaimana para pemimpin ini akan mencapai tujuan mereka.⁴²

Pemimpin *directive* fokus pada panduan kebijakan pribadi dan jalan yang konsisten dengan pandangan mereka sendiri, tetap bekerja dalam norma dan aturan dari posisi saat ini. Sementara pemimpin *consultative* fokus pada pemantauan dukungan atau oposisi terhadap apa yang mereka inginkan Penting bagi orang lain untuk melakukannya dalam kondisi tertentu. Untuk pemimpin yang instruktif dan penasihat, penting bahwa mereka menjadi pusat dari jaringan informasi apapun sehingga mereka dapat memantau siapa yang mendukung atau menentang apa yang menurut mereka harus dilakukan. Pemimpin *reactive* fokus pada menilai apa yang mungkin ada dalam situasi yang mendasari saat ini dan mempertimbangkan kemungkinan elemen kunci,

⁴² Margaret G. Hermann, dkk, 96-97.

sementara pemimpin *accommodative* berfokus kepada mendamaikan perbedaan dan membangun, memberdayakan orang lain dan berbagi tanggung jawab dalam prosesnya. Pemimpin yang *reactive* dan *accommodative* mencoba bersikap rasional saat mereka mencoba memaksimalkan apa yang mungkin dilakukan 24amper meminimalkan biaya.⁴³

Berdasarkan konsep *predominant leaders* yang dijelaskan oleh Margaret G. Hermann dkk., Penulis menganggap konsep tersebut relevan dengan analisis masalah penelitian ini. Konsep tersebut mampu memuat penjelasan tentang kepemimpinan pemimpin yang dominan dalam proses pembuatan kebijakan negara, mendeskripsikan jenis-jenis kepemimpinan yang dimiliki seseorang dan bagaimana pemimpin memainkan perannya sebagai aktor politik yang berpengaruh. Konsep ini menggambarkan dua jenis kepemimpinan umum yaitu *contextually responsive* dan *goal-driven*

Kemudian Hermann dkk membagikan tiga analisis untuk mengetahui bentuk kepemimpinan seorang pemimpin tersebut, yang pertama ialah *reaction to political constraints*, kedua *openness to information* dan terakhir ada *motivation for action*. Tiga variabel tersebut dapat menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan Moon dalam mengeluarkan kebijakannya terkait isu *comfort women*, melihat bagaimana reaksinya terhadap persoalan historis yang tidak kunjung selesai dan menghasilkan keinginan yang tepat bagi Korea Selatan. Selanjutnya melalui penilaian tiga variabel tersebut dijelaskan empat gaya kepemimpinan hasil dari analisis variabel *responsive to constraints* dan *openness to information* dan delapan bentuk gaya kepemimpinan dilihat dari motivasi

⁴³ Margaret G. Hermann, dkk, 98-100.

pemimpin tersebut yang mencirikan kepemimpinan seorang pemimpin yang dominan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupaya menggambarkan dengan jelas dan memahami bagaimana proses dan intensitas akan berpengaruh.⁴⁴ Hal ini bertujuan untuk memperoleh analisis yang lebih tepat yang dicari berdasarkan fakta-fakta yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif mengenai isu yang akan dikaji oleh peneliti, melalui perilaku maupun ucapan yang telah dilontarkan oleh pemimpin negara tersebut. Penulis menggunakan penelitian jenis ini dikarenakan penulisan ini bisa menjelaskan serta memberikan gambaran yang tepat terkait gaya kepemimpinan Moon Jae In dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Jepang terkait isu *comfort women*.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitiannya agar bisa memaksimalkan tujuan utamanya, melihat bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae In ditahun 2017 hingga 2020. Oleh sebab itu, penulis menetapkan nnagi penelitiannya dari tahun 2017 hingga 2020. Periode ini ditetapkan oleh penulis karena sesuai dengan waktu awal mula Presiden Moon Jae In ditetapkan menjadi presiden Korea Selatan. Pada tahun 2018, dan tepatnya pada 21 November Korea Selatan secara resmi mengumumkan pembubaran *The Reconciliation and Healing Foundation* karena

⁴⁴ Pamela Maykut dan Richard Morehous, "Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide," dalam Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 18–20.

dianggap tidak sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh korban penyintas *comfort women* maupun suara masyarakat Korea Selatan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan suatu unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diprediksikan dalam sebuah penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah presiden Korea Selatan Moon Jae In sebagai kepala negara. Sedangkan unit eksplanasinya atau variabel independenya dalam penelitian ini adalah melihat gaya kepemimpinan Moon Jae In dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang pada studi kasus isu *comfort women*. Tingkat atau level analisis menjadi suatu fokus yang akan dibahas dalam suatu penelitian, level analisis dalam penelitian ini tentu saja berada pada level individu. Persoalan yang akan difokuskan terkait gaya kepemimpinan presiden Moon Jae In ini akan memperlihatkan bagaimana kemudian individu bisa memperlihatkan gaya kepemimpinannya dalam kebijakan luar negerinya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data yang berasal dari media cetak online terkait gaya kepemimpinan Moon Jae In maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan terkait isu *comfort women* seperti (New York Times, BBC, Forbes, Korea.net, KBS World Radio, VOA Indonesia, Foreign Policy Magazine, The Diplomat, The Washington Post, Kyodo News, Bloomberg, dan The World). Penulis juga menggunakan website seperti Ensiklopedia Britannica dan beberapa jurnal yang berasal dari Jurnal Penelitian Politik oleh LIPI, The Asian Forum, A Journal of The East Asia Foundation, The International

⁴⁵ Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), 184, diakses Februari 14, 2021.

Journal of Social Science and Humanities Invention, serta jurnal-jurnal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penulis. Dalam mencari data-data terkait penelitian ini penulis menggunakan kata kunci seperti Moon Jae In, Foreign Policy South Korean, Leadership Analysis, Gaya Kepemimpinan, Comfort Women, dan South Korean and Japan Relations.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis dari bagaimana *responsiveness to constructions*, lalu *to information* serta *problem focus* dan *relationship focus* yang akan dilakukan oleh Moon Jae In selaku presiden Korea Selatan dan mengkategorikannya sebagai pemimpin dengan tipe seperti apa. Penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Pemilihan reduksi data pada awal kepenulisan ini disebabkan karena data-data yang diambil oleh peneliti belum tentu memiliki hubungan yang tepat dengan tema yang dipilih, sehingga peneliti akan melakukan pemindaian data dengan data-data yang dianggap memiliki keterkaitan yang kuat hubungannya dengan tema yang dipilih oleh peneliti guna mempermudah peneliti menemukan jawaban yang tepat untuk kepenulisan.

Penggunaan penyajian data yang telah dipindai ini kemudian akan disajikan dalam interpretasi peneliti dengan menggunakan konsep yang digunakan oleh penulis yaitu kebijakan luar negeri dan *predominant leader*. Interpretasi data adalah suatu pola yang memberikan gambaran mengenai latar belakang atau jawaban untuk memberikan hasil dari pertanyaan dengan menyangkutpautkannya

dengan data-data yang telah diperoleh.⁴⁶ Interpretasi ini bisa juga dikatakan sebagai analisis data dengan cara menggambarkan poin dari suatu data untuk menggambarkan sejumlah faktor yang telah ditemukan dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu keadaan. Terakhir penulis akan melakukan penarikan terhadap kesimpulan atas apa yang telah diteliti, kesimpulan ini merupakan poin-poin penting yang didapatkan dari data sebelumnya yang digunakan penulis kedalam penemuan yang akan dipaparkan oleh penulis.

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan mengumpulkan beberapa data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Sumber yang didapatkan dari studi tersebut dapat berupa buku, jurnal, literatur, dokumen resmi, berita, laporan dan bacaan lain yang dirasa dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat serta erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber utama yang berasal dari situs resmi Korea Selatan yaitu *Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea* dan Buku *Moon Jae In Bibliography* oleh Korean Culture and Information Service.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka terhadap tulisan-tulisan ilmiah atau peneliti sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan petunjuk atau perbandingan antara penulis dan peneliti sebelumnya.

⁴⁶ Vijayamohan Pillai N, Data Analysis and Interpretation, *Conference Paper Government of India*, September 29, 2015, 20.

Kemudian terdapat kerangka konseptual sebagai analisis yang akan digunakan, metodologi yang didalamnya meliputi jenis penelitian masalah, unit analisis, pengumpulan dan analisis data dan terakhir sistematika penulisan.

BAB 2 PERJALANAN HIDUP DAN KARIR POLITIK MOON JAE IN

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan tentang awal mula perjalanan hidup Moon Jae In masuk yang dimulai dari kepindahan orang tua Moon dari Korea Utara ke Selatan. Kemudian, bab ini juga akan membahas tentang jalan karir politik Moon di awal mulainya Moon masuk ke dunia politik. Terakhir, penulis akan menjelaskan perjalanan Moon ketika ia mencalonkan diri menjadi presiden Korea Selatan.

BAB 3 KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERKAIT KASUS *COMFORT WOMEN*

Pada bab ketiga ini penulis akan membahas tentang perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu comfort women pada kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In. kebijakan yang dibuat ini kemudian mendapatkan reaksi yang berbeda dari masyarakat serta memberikan dampak bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang termasuk kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang.

BAB 4 GAYA KEPEMIMPINAN MOON JAE IN DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERKAIT KASUS *COMFORT WOMEN*

Bab empat berisikan analisis mengenai gaya kepemimpinan Moon Jae In dalam membentuk kebijakan luar negerinya terhadap Jepang terkait isu *comfort women*.

BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini akan berisikan ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan pada bab satu sampai bab empat yang telah dipaparkan di atas, lalu bab ini akan berisikan juga tentang saran terkait penelitian dan daftar kepustakaan.

